

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan pembatasan jumlah pembuatan akta yang dibuat oleh notaris dalam prespektif peraturan jabatan notaris dan tata cara pengawasan dan pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pembatasan pembuatan akta. Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan pembatasan jumlah pembuatan akta yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Pusat seharusnya tidak perlu. Mengenai pembatasan jumlah pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris, seharusnya juga tercantum di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan dijelaskan secara rinci mengenai pembatasan tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan peraturan yang menjadi pedoman notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta. Apabila pembatasan jumlah pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris hanya tercantum di dalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat saja, sepertinya pengaturan tersebut tidak tegas dan sulit untuk di implementasikan. Pembatasan jumlah pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris yang tercantum di dalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 juga tidak konsisten. Karena seluruh akta yang dibuat oleh notaris dan akta-akta yang berkaitan itu tidak dapat ditolak pembuatannya oleh notaris. Dalam pembuatan akta seorang notaris harus menjamin ke autentikan akta yang dibuatnya. Terutama dalam pembacaan akta secara rinci dan jelas yang memang harus dilakukan oleh notaris agar para pihak paham dan mengerti maksud dan tujuan dari isi akta tersebut serta menghadirkan para saksi minimal 2 orang saksi. Tata cara pengawasan dan pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pembatasan akta. Dewan kehormatan pusat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut terhadap notaris yang terbukti secara sah baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran kode etik notaris, kode etik notaris yang merupakan aturan tertulis yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh notaris agar menciptakan kerukunan sesama notaris sehingga tidak terjadi konflik antar notaris agar bersikap profesional. Dewan kehormatan dalam hal penegakan sanksi kode etik kepada notaris diharapkan selalu berperan aktif agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang dapat mencoreng citra baik jabatan notaris seperti permasalahan di atas tersebut.

Kata Kunci: Pengaturan, Pembatasan, Jumlah Pembuatan Akta Notaris

ABSTRACT

This study aims to review and analyze arrangement delimitation number of making notary deed in perspective notary job regulation and procedures for supervision and provision of sanctions for the notary who commit violations of the limitation of the deed notary. This thesis uses normative juridical research using the approach of law, conceptual approach, and the case approach. The results of this study are arrangement delimitation number of making notary deed who issued by Centre Honor Council should note be necessary. Arrangement delimitation number of making authentic deed made by a notary, it should also be stated in the notary job law and explained in detail about the delimitations. Notary job law is a regulation that is a notary guide in carrying out it's duties and obligations in making deed. If the arrangement delimitation number of making authentic deed that is made in the notary are only listed in the regulation of the central honor council, it seems like that regulation is not firm and difficult to implement. Arrangement delimitation number of making authentic deed made by notary listed in the Centre Honor Council regulation of the 1 year 2017 is also inconsistent. Because all deeds made by notary and deeds related cannot be rejected by the notary. In the making notary deeds must guarantee the deed of an authentic deed. Especially in detailed and clear deed that must be carried out by the notary so that the parties understand meaning of the contents of the deed and the notary is also obliged to present two witnesses. the Centre Honor Council has the authority to impose sunctions on the notary who proves to commit violations of the notary code, which as a written rule that must be carried out or avoid conflict in order to act professional. The Centre Honor Council in enforcement of the code of conduct to the notary is expected to always play an active role ini order so that it does not cause things that can damage good image of the notary position in this study.

Keywords: Arrangement, Delimitation, Number of Notary Deeds.

